

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Amnesti Pajak. (<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>). Diakses 5 Maret 2018)
- Eprints. “Bab II kajian Teori”. Artikel. (<http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf>), Diakses 5 Maret 2018).
- Erwin Silitonga, “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum”, dalam *Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*, 30 Juni 2012.
- Istiqomah. (2016).”Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak”. *Jurnal Nominal*. Volume Vi Nomor 1, 2017.
- J. Moleong, Lexy. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 167 hlm.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 angka 1 UU No. 28/2007.
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Leba. (2016). Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktoral Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta). Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011a) *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi.
- (2016b) *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. (2015). “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XIX, No.02.
- Nugraheni, A. D. (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pangkey, M.M., dkk. (2017). “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kpp Pratama Manado”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12(2). 513-522, 2017.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang pengakuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU no 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Pramushinta dan Baldric Siregar. (2011). “Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 173-189.
- Ragimun, (2016). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rahayu,S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Erlangga: Jakarta.
- Sari,Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Silitonga, E. (2008). *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak*.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan DR., SE., MSi dan Mukhlis Imam DR.,SE.,MSi. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Siti, M., Haris, W. dan Intan, Immanuel. (2014) Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP pratama Kota Madiun). *Jurnal*.
- Siti, Resmi. (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

..... (2014b). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

..... (2015c). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ/2014 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pada Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Wikipedia. (2013). "Kepatuhan". *Artikel*. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan> , diakses 5 Maret 2018).